

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PIUTANG USAHA
PADA PERUSAHAAN YANG PAILIT DI INDONESIA (Putusan PN
MEDAN 9/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Mdn)**

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia Jalan Sampul, Sei Putih Barat,
Medan, Sumatera Utara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tinjauan Yuridis terhadap Piutang Usaha pada perusahaan yang pailit di Indonesia (Putusan PN Medan 9/Pdt.Suspailit/2025/PN Niaga Medan) Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan, Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer yang berasal dari peraturan perundangundangan terkait kepailitan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari kajian ini menunjukkan urutan prioritas antara pajak, upah pekerja/buruh, dan kreditur separatis dalam tingkatan kedudukan kreditur dapat diurutkan sebagai berikut: Upah pokok pekerja/buruh yang belum dibayarkan, Pajak negara, Kreditur separatis/pemegang hak jaminan kebendaan, Hak-hak pekerja/buruh yang lainnya seperti pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana tercantum dalam Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Proses pembagian hasil penjualan harta pailit meliputi likuidasi aset , penyusunan Daftar Pembagian (DPO) oleh kurator, persetujuan Hakim Pengawas , dan pembayaran bertahap sesuai prioritas kreditur (biaya kepailitan, upah karyawan, kreditur preferen, lalu kreditur konkuren/konkuren), dengan dasar asas pari passu prorata parte (pembagian proporsional) bagi yang setara, di bawah pengawasan Pengadilan Niaga. Jika harta debitor tidak cukup untuk membayar utang-utangnya, maka kurator dapat melakukan upaya hukum untuk memaksimalkan jumlah harta pailit antara lain dengan mengajukan gugatan actio pauliana, yakni gugatan yang dilakukan oleh kurator untuk membatalkan transaksi yang dilakukan debitor, yang mana oleh debitor dilakukan sebelum dinyatakan pailit

Kata Kunci : Piutang Usaha, Pailit dan Daftar Pembagian

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal review of accounts receivable in bankrupt companies in Indonesia (Medan District Court Decision 9/Pdt.Sus-pailit/2025/PN Niaga Medan). The data collection technique used in this study was literature study. The types and sources of data used in this study were primary data derived from laws and regulations related to bankruptcy, court decisions, and legal doctrine. The data analysis technique used in this study was qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate the priority order between taxes, workers' wages, and secured creditors in terms of creditor status can be ranked as follows: Unpaid basic wages of workers/laborers, State taxes, secured creditors/holders of material security rights, and other workers' rights such as severance pay, long-service awards, and compensation for rights that should have been received as stated in Article 156 paragraph (1) of the Manpower Law. The process of distributing proceeds from the sale of bankruptcy assets includes asset liquidation, preparation of a Distribution List (DPO) by the curator, approval by the Supervisory Judge, and phased payments according to creditor priority (bankruptcy costs, employee wages, preferred creditors, and concurrent creditors), based on the principle of pari passu prorata parte (proportional distribution) for equals, under the supervision of the Commercial Court. If the debtor's assets are insufficient to pay their debts, the curator can take legal action to maximize the amount of the bankruptcy assets, including filing an actio pauliana lawsuit, a lawsuit filed by the curator to cancel transactions entered into by the debtor prior to being declared bankrupt.

Keywords: Accounts Receivable, Bankruptcy, and Distribution List